

**PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, AKUNTABILITAS,
TEKANAN EKSTERNAL, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN
KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP PENERAPAN
TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota di
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**Erni Suryandari Fathmaningrum & Giri Bimo Mukti
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, tekanan eksternal, pengendalian internal, dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada organisasi perangkat daerah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sampel pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berbentuk dinas, dan badan keuangan aset daerah dengan total 103 Organisasi Perangkat Daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Uji Hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan menggunakan aplikasi software *SPSS v.15*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, tekanan eksternal, pengendalian internal, dan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Kata kunci: ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, tekanan eksternal, pengendalian internal, dan komitmen manajemen.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki

kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan dengan asas otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 bahwa, daerah-daerah diberikan hak untuk mengatur pendanaan keuangan atas pelaksanaan otonomi daerah.

Asroel (2016), mengatakan bahwa Undang-Undang diatas sudah menjelaskan tentang konsep otonomi daerah, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas. Perkembangan pengelolaan otonomi daerah di Indonesia pada saat ini dapat menggambarkan adanya respon dari masyarakat yang cukup baik kepada pemerintah daerah untuk menerapkan *good government governance* (pemerintahan yang baik).

Penerapan *good governance* mencakup beberapa elemen yang salah satunya pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah wajib diproses melalui proses akuntansi yang kemudian disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) wajib disetorkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) paling lambat 6 bulan setelah waktu penganggaran tersebut berakhir.

Tahun 2015, Indonesia memperoleh skor 36 dalam *Corruption Perception Index* (CPI), dan menempati peringkat 88 dari 168 negara yang diukur. Tahun 2016 skor Indonesia pada *Corruption Peception Index* (CPI) mendapat skor 37, dan menempati peringkat 90 dari 176 negara yang diukur. Kemudian, pada tahun 2017 skor Indonesia dalam *Corruption Perception Index* (CPI) stagnan pada skor 37, dan

menempati peringkat 96 dari 180 negara yang diukur. Skor CPI memiliki rentang nilai 0-100. Apabila suatu negara memperoleh skor CPI pada rentang yang kecil maka dipersepsikan negara tersebut memiliki tingkat korupsi yang tinggi.

Kaitannya dengan penerapan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah, salah satunya adalah pemerintah daerah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah-pemerintah daerah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memang sudah menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Contohnya, pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman, sudah mempublikasikan laporan keuangan di *website* Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) masing-masing, kecuali pemerintah Kota Yogyakarta yang mempublikasikan laporan keuangannya di *website* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Yogyakarta.

Laporan keuangan yang dipublikasikan secara lengkap (sampai laporan anggaran 2017) hanya Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman, untuk pemerintah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul laporan keuangan yang dipublikasikan masih belum lengkap seperti kabupaten yang lainnya. Laporan lainnya, hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 192 laporan dugaan tindak pidana korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, menurut peneliti transparansi laporan keuangan penting untuk diteliti, karena hal tersebut dapat mencerminkan kinerja suatu pemerintahan suatu daerah khususnya dalam hal transparansi laporan keuangan supaya, publik bisa mengetahui dan juga menilai kinerja dari suatu

pemerintah daerah dan dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti korupsi.

Penelitian yang dilakukan merupakan penggabungan penelitian dari Amelia (2015) dan Masruroh (2015) dengan menggunakan variabel independen yaitu ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, tekanan eksternal, pengendalian internal, dan komitmen manajemen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu populasi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan popuasi pemerintah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga waktu penelitian yang dilakukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* didefinisikan ketika seorang manajer tidak mementingkan tujuan individu, namun manajer lebih termotivasi terhadap kepentingan bersama (Davis dkk 1997). Davis dkk (1997) mengatakan bahwa teori ini menjelaskan bahwa seorang *steward* akan berperilaku sesuai dengan tujuan bersama dan ketika kepentingan seorang *steward* dan pemilik disini memiliki perbedaan, maka *steward* akan lebih mengajak bekerja sama karena *steward* di sini lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi/individu.

Teori Institusional

Teori institusional didasari pada pemikiran untuk bertahan hidup. Teori ini bisa digunakan untuk mejelaskan tindakan dan juga pengambilan keputusan didalam organisasi publik tersebut. Menurut Setyowati (2017) sebuah organisasi diwajibkan untuk mampu menyakinkan kepada publik bahwa organisasi

merupakan entitas secara resmi, dan layak untuk dikembangkan. Teori institusional juga mengemukakan bahwa organisasi yang lebih mementingkan legitimasi akan memiliki kemauan untuk beradaptasi pada harapan sosial atau harapan pihak eksternal. Maka dari itu, ketika sebuah organisasi melakukan adaptasi pada harapan eksternal maupun harapan sosial hal itu menimbulkan organisasi melakukan pemisahan kegiatan yang sifatnya internal dan berfokus kepada sistem-sistem simbolis yang tertuju pada pihak eksternal.

Teori Signaling

Teori *signaling* menjelaskan tentang pemberian *signal* oleh manajemen yang tujuannya untuk mengurangi asimetri informasi (Lo 2012). Maka dari itu, apabila manajemen mengetahui tentang kondisi keuangan yang sesungguhnya daripada *stakeholder*, maka manajemen bisa memberikan sinyal dengan mencatat akrual diskresioner.

Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian lingkungan bisa dijabarkan sebagai faktor-faktor dari dalam maupun luar organisasi yang mungkin berpengaruh terhadap organisasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Setyowati (2017) mengatakan bahwa ketidakpastian lingkungan meliputi perubahan-perubahan regulasi pemerintah, perubahan dinamika masyarakat, dan perubahan di dalam organisasi tersebut. Penelitian Masruroh (2015), Hamdi (2017), dan Yunaz (2017) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan memiliki pengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis pertama yaitu:

H₁: Ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atau individu terhadap apa yang telah dilakukannya. Amelia (2015) mengatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban kepada publik untuk mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap publik terutama dalam hal penerapan transparansi laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adha (2014), Amelia (2015), Asroel (2016), dan Hamdi (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis kedua yaitu:

H₂: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Tekanan Eksternal

Tekanan eksternal merupakan suatu tekanan yang berasal dari luar suatu entitas. Tekanan dari pihak eksternal bisa memengaruhi suatu organisasi/entitas untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Setyowati (2017) mengatakan tekanan dari pihak eksternal biasanya berupa peraturan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lembaga-lembaga formal dan non-formal lainnya. Peraturan-peraturan yang dibentuk oleh pemerintah gunanya untuk mengatur jalannya organisasi (terutama Organisasi Perangkat Daerah) supaya dalam melakukan kegiatan-kegiatan bisa berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridha dan Basuki (2012), Amelia (2015), Purnamasari (2015), Masruroh (2015), Yunaz (2016), Hamdi (2017) dan Noprizal (2017) menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi laporan keuangan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis ketiga yaitu:

H₃: Tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan proses pengendalian kepada seluruh aktifitas-aktifitas karyawan yang dimana dilakukan oleh seorang pimpinan secara rutin supaya kinerja dari organisasi tersebut bisa optimal. Sedangkan dalam pemerintahan, pengendalian internal dilakukan kepada kinerja pemerintah pusat dan juga kepada pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2015), Masruroh (2015), dan Yuliani (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis keempat yaitu:

H₄: Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Komitmen Manajemen

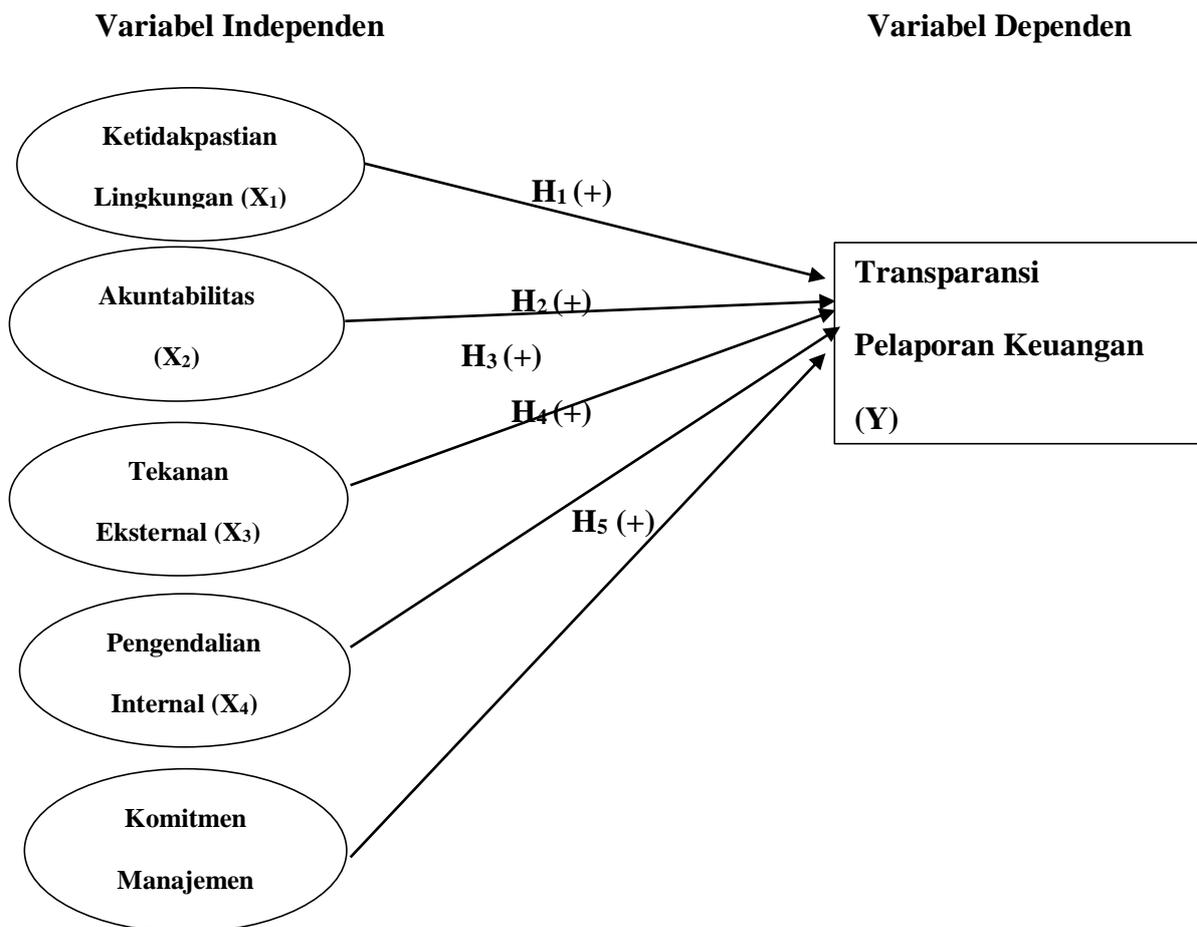
Komitmen merupakan kemampuan suatu individu untuk menyasikan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Hamdi (2017) mengatakan bahwa hal tersebut berhubungan dengan cara-cara menykseskan tujuan dari organisasi tersebut dengan lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada

kepentingan pribadi. Menurut Maruroh (2015) komitmen bisa diartikan sebagai penerimaan kuat yang diterima oleh individu yang berfokus pada tujuan dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam organisasi. Penelitian Ridha dan Basuki (2012), Masruroh (2015), Hamdi (2017), dan Noprizal (2017) menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis kelima yaitu:

H₅: Komitmen Manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

Model Penelitian

Model penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Obyek penelitian pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah daerah tingkat II yaitu pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah daerah tingkat II di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 142 OPD yang terdiri dari dinas, badan, dan kantor.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer, data tersebut diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa ada media perantara. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, dan di dalam kuesioner tersebut berisikan pernyataan mengenai topik tentang kompetensi sumber daya manusia, akuntabilitas, tekanan eksternal, pengendalian internal dan komitmen manajemen.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini *purposive sampling*, karena kemudahan peneliti dalam menjangkau sampel dan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Sampel yang digunakan pada

penelitian ini adalah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang berbentuk dinas dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) karena dalam pusat pertanggungjawaban, dinas sebagai *the operating core* atau unit yang terlibat dalam pelayanan publik sehingga dinas-dinas yang lebih banyak menggunakan anggaran untuk kepentingan pelayanan publik dan Badan Keuangan Aset Daerah yang mengelola laporan keuangan seluruh OPD yang kemudian di publikasikan kepada publik (Pratolo, dan Jatmiko 2017).

Kriteria responden yang digunakan dalam pengambilan sampel meliputi:

Aparatur OPD yang memiliki jabatan sebagai kepala dinas dan bkad, sekretaris dinas dan bkad, dan kepala sub bagian keuangan/akuntansi yang sudah menjabat minimal 1 (satu) tahun.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada responden secara langsung dan kuesioner diambil kembali oleh peneliti dengan waktu yang telah dijanjikan responden. Kuesioner diberikan dengan melampirkan surat pengantar dari universitas dan surat permohonan pengisian kuesioner. Kuesioner yang digunakan untuk penelitian ini memakai skala likert 1-5.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti mengambil sampel Organisasi Pemerintah Daerah yang berbentuk Dinas dan Badan Keuangan Aset Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan peta distribusi yang terlihat dalam tabel 1:

Tabel 1
Data Penyebaran Kuesioner

No.	Nama Kota/ Kabupaten	Kuesioner di Bagikan	Kuesioner yang kembali
1.	Kota Yogyakarta	66	63
2.	Sleman	63	56
3.	Bantul	60	57
4.	Kulon Progo	63	60
5.	Gunungkidul	57	56
Total		309	292

Tabel 2
Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dikirim	309	100%
Kuesioner yang kembali	292	94%
Kuesioner yang tidak kembali	17	6%
Kuesioner yang dapat kembali dan diolah	280	91%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	12	3%

Hasil uji statistik deskriptif variabel penelitian pada tabel 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Teoritis		Aktual	
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean
Ketidakpastian Lingkungan	5-25	15	12-25	19,68
Akuntabilitas	4-20	12	12-20	15,60
Tekanan Eksternal	5-25	15	14-20	19,49
Pengendalian Internal	5-25	15	14-20	19,88
Komitmen Manajemen	5-25	15	14-20	20,14

Transparansi Pelaporan Keuangan	6-30	18	18-30	23.72
--	-------------	-----------	--------------	--------------

Berdasarkan tabel di atas, variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki nilai mean aktual lebih besar dari mean teoritis, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, tekanan eksternal, pengendalian internal, dan komitmen manajemen yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tinggi.

Uji Validitas

Hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 3
Uji Validitas

Variabel	Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	Keterangan
Ketidakpastian Lingkungan	0.558	Valid
Akuntabilitas	0.689	Valid
Tekanan Eksternal	0.723	Valid
Pengendalian Internal	0.683	Valid
Komitmen Manajemen	0.631	Valid
Transparansi Pelaporan Keuangan	0.788	Valid

Berdasarkan tabel di atas nilai *KMO* semua variabel di atas 0,5, maka seluruh butir pertanyaan semua variabel valid.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
KetidakpastianLingkungan	0,600
Akuntabilitas	0,658
Tekanan Eksternal	0,761
Pengendalian Internal	0,766
Komitmen Manajemen	0,777
Transparansi Pelaporan Keuangan	0,815

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* seluruh variabel di atas 0,6, maka dapat disimpulkan pernyataan-pernyataan keenam variable dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang cukup tinggi.

Uji Normalitas

Berikut hasil uji normalitas antara lain:

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.899

Sumber: output SPSS v.15

Berdasarkan tabel di atas uji *kolmogorov-smirnov* dengan nilai signifikansi sebesar $0,899 > a 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berikut hasil uji multikolinearitas antara lain:

Tabel 6
Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ketidakpastian Lingkungan	.994	1.006
	Akuntabilitas	.624	1.601
	Tekanan Eksternal	.470	2.129
	Pengendalian Internal	.741	1.349
	Komitmen Manajemen	.741	1.349

Tabel di atas menjelaskan bahwa data yang ada pada masing-masing variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hasil ini dapat dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* secara keseluruhan < 10 dan nilai tolerance $> 0,1$, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terkena multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut hasil uji heteroskedastisitas antara lain:

Tabel 7
Uji Heteroskedastisitas

Model		Sig.
1	(Constant)	.380
	Ketidakpastian Lingkungan	.139
	Akuntabilitas	.296
	Tekanan Eksternal	.891
	Pengendalian Internal	.556
	Komitmen Manajemen	.285

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini memperoleh nilai signifikansi secara keseluruhan variabel lebih besar dari 0,05 maka, data yang terdapat dalam penelitian ini dapat disimpulkan tidak terkena heteroskedastisitas. Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

Uji Regresi Berganda

Berikut hasil uji regresi berganda antara lain:

Tabel 8
Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Sig
	B	Std. Error	
1 (Constant)	.367	.183	0.45
Ketidakpastian Lingkungan	0.12	0.06	0.25
Akuntabilitas	0.40	0.08	0.000
Pengendalian Internal	1.090	0.08	0.001
Komitmen Manajemen	0.40	0.06	0.000
	NILAI		
<i>Sig-F</i>	0.000		
<i>Adjusted R²</i>	0.994		

Berdasarkan tabel di atas, nilai uji koefisien determinasi memiliki nilai sig sebesar 0.000, maka dapat disimpulkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel di atas, nilai *adjusted R²* sebesar 0.994, maka dapat disimpulkan 99,4 % variabel independen menjelaskan variabel dependen, dan sisanya 0,6 % dijelaskan variabel oleh variabel lain yang tidak di teliti pada penelitian ini.

Uji Hipotesis 1 (H₁)

Berdasarkan tabel di atas variabel ketidakpastian lingkungan memiliki nilai signifikansi $0,025 < a < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,012, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H₁) diterima.

Uji Hipotesis 2 (H₂)

Berdasarkan tabel di atas variabel akuntabilitas memiliki nilai signifikansi $0,000 < a < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,040, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H₂) diterima.

Uji Hipotesis 3 (H₃)

Berdasarkan tabel di atas variabel tekanan eksternal memiliki nilai signifikansi $0,000 < a < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 1,090, maka dapat disimpulkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan

transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H₃) diterima.

Uji Hipotesis 4 (H₄)

Berdasarkan tabel di atas variabel pengendalian internal memiliki nilai signifikansi $0,001 < a 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,022, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H₄) diterima.

Uji Hipotesis 5 (H₅)

Berdasarkan tabel di atas variabel komitmen manajemen memiliki nilai signifikansi $0,000 < a 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,040. Maka dapat disimpulkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H₅) diterima.

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Simpulan

Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah:

1. Ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5. Komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka, saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya adalah:

1. Metode survei sebaiknya dilengkapi dengan teknik wawancara atau menggunakan pertanyaan lisan, sehingga pengisian kuesioner menjadi lebih objektif.
2. Penelitian selanjutnya mungkin tidak hanya pemerintah tingkat II, namun bisa menambahkan pemerintah tingkat I.
3. Lebih diperhatikan dalam pemilihan sampel, mungkin sampel bisa ditambahkan dengan Organisasi Pemerintah Daerah yang berbentuk badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, W. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Pimpinan Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kota Dumai). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol.1 No.2.
- Amelia, R. (2015). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol 2. No.2.1-15
- Asroel, R. S. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan, dan Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol.3 No.1. 867-880

- Davis, James H; Schoorman, F. David; Donaldson, Lex;. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management*, 20-47.
- Hamdi, F. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol.4 No.1. 3514-3528
- Lo, E. W. (2012). Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan Terhadap Manajemen Laba: Teori Keagenan Versus Teori Signaling . *JRAK*, Volume 8, No.1.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Masruroh, A. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Kota. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.4 No.7. 1-20
- Nazaruddin, Ietje; Basuki, Agus Tri;. (2015). *Analisis Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Noprizal, R. (2017). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen, dan Sistem Pengendalian Pemerintah Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 4 No.1. 1066-1080
- Nosihana, Ariefia; Yaya, Rizal;. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* , Vol.3. 89-104
- Pratolo, S. (2008). Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Organisasional Manajer, Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Kinerja Badan Milik Usaha Negara di Indonesia . *Jurnal Akuntansi dan Investasi* , 22-47.

- Pratolo, S., & Jatmiko, B. (2017). *Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Purnamasari, R. W. (2015). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Tekanan Eksternal, dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA Surabaya*, Vol.4 No.2. 1-17
- Putra, B. M. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Skripsi Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Rasul, S. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Ridha, M. Arsyadhi; Basuki, Hardo;. (2012). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Saputra, J. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, dan Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Sari, R. M. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Faktor Organisasional, dan Penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 117-114.
- Setyowati, D. F. (2017). Pengaruh Tekanan Eksternal, Sumber Daya Manusia, Komitmen Manajemen, dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Sihalolo, J. (2014). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol.1 No.1.

Silver, D. (2015). Creating Transparency for Public Companies the Convergence of PR and IR in the Post-Sarbanes-Oxley Marketplace. *Public Relations Strategist: Winter*, Vol. 11 Issue 1,14.

Silvia. (2013). Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, dan Otoritas Pengambilan Keputusan terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah. *Skripsi Universitas Negeri Padang*.

Sofyani, H., & Akbar, R. (2013). Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 10 No. 2.

Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas, dan Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 1-14.

Yunaz, A. R. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Organisasi, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Penerapan Transparansi Laporan Keuangan. *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, Vol. 3 No. 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

Intruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012

Indeks Persepsi Korupsi 2017, Skor Indonesia di Angka 37,

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan>. Diakses 27 April 2018 pk

09.27 WIB.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017, <http://riset.ti.or.id>. Diakses 10 Mei 2018 pk 09.27 WIB.

Indeks Persepsi Korupsi 2017, Jakut Raih Predikat Terbersih, <https://news.detik.com>. Diakses 10 Mei 2018 pk 09.34 WIB.

Peluncuran *Corruption Perception Index*, <http://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2017>. Diakses 28 April 2018 pk 20.43 WIB.

KPK Terima 192 Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di DIY, <https://news.detik.com>. Diakses 01 Oktober 2018 pk 12.45 WIB.

192 Kasus Korupsi DIY Masuk ke Laporan KPK, <https://www.inews.id>. Diakses 29 April 2018 pk 21.30 WIB.

Dalam 3 Tahun Terakhir, KPK Terima Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dari DIY, <http://jogja.tribunnews.com>. Diakses 29 September 2018 pk 15.45 WIB.

KPK Terima 192 Laporan Dugaan Kasus Korupsi di DIY, <https://www.liputan6.com>. Diakses 29 April 2018 pk 21.30 WIB.

Bantul Kembali Raih WTP, <https://www.krjogja.com>. Diakses 11 November 2018 pk 19.40 WIB.

Meraih WTP, Pemda DIY Terima Catatan dari BPK, <https://www.jogja.tribunnews.com>. Diakses 13 Desember 2018 pk 21.30 WIB.

Sleman Kembali Raih Opini WTP, <https://inspektorat.slemankab.go.id>. Diakses 29 September 2018 pk 20.30 WIB.

Kulon Progo Raih Opini WTP, <http://jogja.tribunnews.com>. Diakses 29 September 2018 pk 20.30 WIB.

Kabupaten dan Kota Raih WTP, Tetapi Tetap ada PR
<http://jogjapolitan.harianjogja.com>, Diakses 13 Desember 2018 pk 21.30 WIB.

Pemerintah Kabupaten Bantul, <https://www.bantulkab.go.id>. Diakses 28 April 2018
pk 20.43 WIB.

Pemerintah Kabupaten Sleman, <https://www.slemankab.go.id>. Diakses 28 April 2018
pk 20.43 WIB.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, <https://www.gunungkidulkab.go.id>. Diakses 28
April 2018 pk 20.43 WIB.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, <https://www.kulonprogokab.go.id>. Diakses 28
April 2018 pk 20.43 WIB.

Pemerintah Kota Yogyakarta, <https://www.jogjakota.go.id>. Diakses 28 April 2018 pk
20.43 WIB.

Badan Keuangan Aset Daerah Sleman, <https://www.bkad.slemankab.go.id>. Diakses
30 April 2018 pk 19.40 WIB.

Badan Keuangan Aset Daerah Bantul, <https://www.bkad.bantulkab.go.id>. Diakses 30
April 2018 pk 19.40 WIB.

Badan Keuangan Aset Daerah Gunungkidul, <https://www.bkad.gunungkidulkab.go.id>.
Diakses 30 April 2018 pk 19.40 WIB.

Badan Keuangan Aset Daerah Kulon Progo, <https://www.bkad.kulonprogokab.go.id>.
Diakses 30 April 2018 pk 19.40 WIB.